

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah normalisasi sering menjadi perbincangan di dalam ranah politik internasional di era saat ini. Sejarah dari kata *normalize* yang didiskripsikan sebagai “*a return to normalcy*” muncul semenjak tahun 1800 di bidang ilmu kesehatan. Namun istilah normalisasi terus berkembang sampai politik internasional sebagai sebuah konsep didalam hubungan diplomatik negara. Menurut Barston, normalisasi diartikan sebagai proses mewujudkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengakhiri konflik lewat beberapa cara seperti gencatan senjata, perjanjian damai, atau membangun hubungan diplomatik.¹ Barston menambahkan :

*“Normalisation is seen as a process involving; the recognition of the need for measure to reduce tension or friction, and their introduction; promotion of improved relations; and isolation, containment or resolution – wholly or partly – of major sources of dispute or tension.”*²

Dalam kasus perdamaian antara dunia Arab dengan Israel, Arab Saudi merupakan pihak yang mengupayakan perdamaian dengan Israel dapat terealisasikan di Timur Tengah. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk membentuk hubungan yang normal tanpa perselisihan antara negara Arab dengan Israel. Berdasarkan catatan sejarah di Timur Tengah, upaya normalisasi dari Arab

¹ R.P Barston, ” Modern Diplomacy,” Routledge, Fourth Edition, (2014). Hlm. 52

² R.P Barston, ” Modern Diplomacy,” Hlm. 275

Saudi sempat tercipta atas inisiatif Pangeran Fahd, yaitu *the Fez plan*³ di tahun 1982. Meskipun upaya normalisasi awal tidak mendapat perhatian internasional, Raja Salman lewat *Arab Peace Initiative* (API) ditahun 2002 kembali memperlihatkan keinginan Arab Saudi melakukan normalisasi dengan Israel. Sebagai instrumen normalisasi, API berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari negara anggota Liga Arab, tidak seperti inisiatif *the Fez plan* sebelumnya. Keberadaan API sebagai instrumen perdamaian utama antara negara Arab dengan Israel diterima oleh keseluruhan negara anggota Liga Arab ditahun 2007 karena isinya yang menjamin kemerdekaan rakyat Palestina sebagai syarat utama normalisasi yang harus dikabulkan Israel.⁴ Syarat tersebut menjadikan posisi Palestina sebagai penentu proses normalisasi berlangsung beberapa tahun kemudian. Hal tersebut terbukti ketika terjadinya Perang Libanon II ditahun 2006 dan *Cast Lead Operation* yang dilakukan Israel ditahun 2008.⁵ Operasi yang lebih dikenal sebagai “Pembantaian 1477 warga Gaza” ini membuat proses normalisasi terhambat karena kecaman negara Arab terhadap aktifitas politik luar negeri Israel dalam kasus tersebut.⁶ Dari kecaman tersebut dapat terlihat bagaimana Arab Saudi dengan negara Arab lainnya memprioritaskan keamanan warga di tanah Palestina ketimbang yang lainnya sebagai syarat proses normalisasi antar negara.

³ The Fez Plan merupakan kelanjutan wacana damai yang di pelopori oleh putra mahkota Arab Saudi, Fahd ibn Abd al-Aziz, yang muncul di tahun 1981 dan melahirkan *eight point peace plan* yang didalamnya juga memuat keinginan Arab Saudi mengakui kedaulatan Israel dengan beberapa syarat. Namun wacana tersebut banyak ditentang oleh kebanyakan bangsa Arab lainnya dan pemerintah Israel tidak memiliki *interest* yang cukup untuk mengiyakan hal tersebut.

⁴ Avi Issacharoff, “Arab States Unanimously Approve Saudi Peace Initiative,” (29 Maret 2007). *haaretz.com*. <http://www.haaretz.com/1.4813455> (Diakses pada 20 Januari 2019)

⁵ Guzansky Y, “Israel and the Arab Gulf states from tacit cooperation to reconciliation Israel Affairs,” 21(1). (2014). hlm.134.

⁶ Al-Haq, “Operation Cast Lead: A Statistical Analysis,” (Agustus 2009). hlm.1-15

Namun beberapa tahun kemudian Arab Saudi memasuki fase baru dimana pihak Arab Saudi sendiri memperlihatkan aktivitas yang mengindikasikan Palestina tidak lagi relevan sebagai prioritas kebijakan luar negeri mereka. Proses normalisasi lewat API masih tetap berjalan, terutama ketika API kembali muncul di Deklarasi Amman 2017.⁷ Namun, semakin intensifnya upaya dari Arab Saudi dapat terlihat terutama ketika Muhammad bin Salman (MBS) mengeluarkan pernyataan terkait hak tanah air Israel bersamaan dengan Palestina pada tahun 2018.⁸ Meskipun begitu, upaya normalisasi sudah terlihat mulai dari kunjungan tidak resmi dari mantan jenderal Arab Saudi Anwar Eshki ke Israel di Juli 2016 dengan membawa delegasi yaitu beberapa sarjanawan dan pembisnis untuk membahas normalisasi dan diizinkan pengguna jalur lintas udara Arab Saudi dilintasi maskapai asal India, *India Airlines*, yang bertujuan ke Israel pada tahun 2018.⁹

Sikap proaktif normalisasi yang dilakukan Arab Saudi mendapatkan kecaman dari negara Arab lainnya, baik dari pihak kelompok negara, maupun individu. Sebagai kelompok yang pernah didukung oleh Arab Saudi sampai tahun 2004, Hamas merupakan salah satu kelompok yang mengecam sikap proaktif yang ditunjukkan Arab Saudi tersebut.¹⁰ Meskipun memiliki misi untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina, pandangan Arab Saudi dan

⁷ Khader Bichara, "The Palestinian Question and the Arabs (1917-2017) : Popular Support, Government Stakes," *IEMed. Mediteranian Yearbook 2017*. (2017). hlm.29

⁸ TIME, "Crown Prince Mohammed bin Salman talks to TIME about the Middle East, Saudi Arabia's Plans and President Trump," (April 2018). *TIME* <http://time.com/5228006/mohammed-bin-salman-interview-transcript-full/>

⁹ Tova Cohean dan Ari Rabinovitch, "Exclusive : Israel's El Al seeks international help to access Saudi airspace," (Maret 2018). *reuters.com*. <https://www.reuters.com/article/us-el-al-arabns-saudi-exclusive/exclusive-israels-el-al-seeks-international-help-to-access-saudi-airspace-idUSKCN1GD4SZ> (Diakses pada 5 Januari 2019)

¹⁰ Scott MacLeod, "Time to Test the Arab Peace Offer," *TIME*. (8 January 2009).

kelompok Hamas memiliki perbedaan dalam mencapainya. Kelompok gerakan *Boycott, Divestment, and Sanction Gulf* (BDS Gulf) di tiap negara teluk Arab merupakan kelompok lainnya yang menyayangkan aktivitas dari Arab Saudi terhadap Israel tersebut. Kritikan dari gerakan ini terhadap pemerintahan Arab Saudi muncul ketika konferensi tingkat regional pertama kalinya di kawasan negara teluk Arab yaitu di Kuwait.¹¹ Kegiatan tersebut dihadiri beberapa figur publik, aktifis, dan figur politik dari berbagai negara di kawasan negara teluk Arab. Dari dalam negeri, kecaman juga muncul dari kalangan ulama besar Arab Saudi yaitu Safar al-Hawali yang sejak dari dulu menentang keberadaan tentara A.S. di Teluk Arab dan pernah menentang pemerintahan Arab Saudi. Arab Saudi sempat menahan Al-Hawali dari tahun 1994-1999 karena hal tersebut.¹² Namun penangkapan di tahun 2018 beserta keluarga al-Hawali dikarenakan penentangan intensifnya normalisasi Arab Saudi dengan Israel yang mengabaikan kepentingan Palestina didalam bukunya yang berjudul *Muslim and Western Civilization*.¹³

Dengan perkembangan normalisasi yang dilakukan Arab Saudi, prioritas kepentingan kerajaan Arab Saudi pada tahun 2015-2018 sebagai pengupaya normalisasi menjadi sebuah pertanyaan di dalam dinamika normalisasi. Prioritas kepentingan tersebut terlihat jelas terutama dengan berlanjutnya proses normalisasi meski adanya kecaman yang datang dari publik Saudi sendiri. Proses

¹¹ BDS,” BDS Gulf Holds its First Regional Anti-Normalisation Conference,” *Palestinian Boycott, Divestment, and Sanctions National Committee (BNC)*. (24 November 2017). <http://bdsmovement.net/news/bds-gulf-holds-its-first-regional-anti-normalisation-conference> (Diakses Pada 3 Oktober 2018).

¹² Stephen Kalin,” Saudi Arabia arrest prominent cleric Safar al-Hawali : Activist,” Editor: Robin Pomeroy. (13 Juli 2018). *reuters.com*. <https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests/saudi-arabia-arrests-prominent-cleric-safar-al-hawali-activists-idUSKBN1K22PQ> (Diakses pada 23 Januari 2019)

¹³ TheNewArab,”Saudi Preacher Arrested, days after releasing book blasting royal family,”. *al-araby.co.uk* <https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/7/12/saudi-authorities-arrest-top-cleric-in-crackdown-on-dissent>. (12 Juli 2018) (Diakses pada 23 Januari 2019)

desekuritisasi yang dilakukan kerajaan Arab Saudi perlu untuk dianalisis untuk mengenali lebih lanjut kepentingan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Normalisasi yang dilakukan Arab Saudi telah berjalan puluhan tahun.. Meskipun beberapa hambatan bermunculan (terutama Perang Lebanon 2006 dan *Operasi Cast Lead* yang dilancarkan Israel) Arab Saudi masih menjadi pelaku diantara negara Arab lainnya dalam perundingan normalisasi. Namun, di tahun 2015 terjadi perubahan pendekatan upaya normalisasi Arab Saudi. Jika sebelumnya Arab Saudi mengajukan normalisasi lewat forum besar seperti Liga Arab agar negara Arab lainnya tidak ketinggalan dalam melakukan normalisasi, semenjak dilantiknya Salman bin Abdulaziz Al Saud sebagai raja Arab Saudi menjadi titik awal perubahan pendekatan. Meskipun Arab Saudi mendapat kecaman dari beberapa pihak, Arab Saudi tidak berhenti dari upaya mereka untuk melakukan normalisasi bilateral. Dimulai dari pernyataan yang mendukung hak Israel memiliki tanah air, kunjungan tidak resmi Anwar Eshki, dan beberapa indikasi lainnya masih terus bermunculan bahkan sampai diakhir tahun 2018. Kepentingan berbeda mulai terlihat dari kerajaan Arab Saudi, terutama dengan semakin maraknya peristiwa revolusi yang dapat mengancam kerajaan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus utama yang menjadi pertanyaan penelitian peneliti adalah “*Mengapa Arab Saudi mengupayakan normalisasi dengan Israel di rentang waktu 2015-2018?*”.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian berupaya untuk menjelaskan alasan upaya normalisasi yang dilakukan Arab Saudi terhadap Israel terutama di rentang waktu tahun 2015-2018 dari pandangan keamanan negara yang dimiliki Arab Saudi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk semua kalangan pembaca, terutama dari beberapa hal seperti :

1. Secara Akademik, penelitian ini dilakukan supaya menjelaskan lebih dalam alasan upaya normalisasi yang dilakukan Arab Saudi terhadap Israel di rentang waktu tahun 2015-2018.
2. Secara Praktek, penelitian ini dilakukan supaya menghasilkan penjelasan desekuritisasi isu yang mendalam terkait analisis normalisasi Arab Saudi sebagai sebuah negara sesuai dengan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Secara Teoritikal, dilakukannya penelitian ini diharapkan akan adanya pemahaman baru dalam pengaplikasian kerangka berpikir teori desekuritisasi di salah satu kasus yang terjadi di Timur Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber pustaka yang dapat mendukung proses analisis penelitan.

Berdasarkan penelitian dari Aglaya Snetkov yang berjudul “*Theories, methods and ‘practices of (de)securitization’ : The Russia-Chechnya case*”¹⁴ menjelaskan bagaimana terdapat perbedaan pola pikir dalam menganalisis desekuritisasi, seperti yang Bezer Coskun sampaikan dalam meneliti desekuritisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari empat interpretasi yang mendefinisikan sebuah desekuritisasi yang dikemukakan Hansen. Pertama, desekuritisasi dilihat sebagai “*a form of détente*”. Artinya desekuritisasi mengimplikasikan “keluar secara perlahan dari wacana *security* sehingga memfasilitasi jalan perjanjian politik yang murni dan tidak militaristik atau keras”. Kedua, desekuritisasi dilihat sebagai penggantian. Artinya “kombinasi antara satu isu sekuritisasi dikeluarkan dari *security* dengan satu isu lainnya di sekuritisasi secara serentak”. Ketiga, desekuritisasi dilihat sebagai re-artikulasi. Artinya desekuritisasi menghapus sebuah isu yang di sekuritisasi dengan memberikan solusi politik terhadap ancaman, bahaya dan keluhan yang dipertanyakan. Dan yang keempat, desekuritisasi dilihat sebagai “*a process of silencing*”. Artinya desekuritisasi ketika sebuah isu menghilang atau gagal menjadi *security*.

Dari penelitian Snetkov, penelitian desekuritisasi melihat *referent object* berada pada negara seperti Ceko, Rusia, dan kawasan Utara Kaukasus. Pemilihan Snetkov terhadap ketiga objek tersebut menjadi panduan dalam menganalisis objek mana yang pada awalnya di-sekuritisasi hingga berakhir dengan proses desekuritisasi. Khusus pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan Arab

Saudi sebagai *referent object* untuk mengetahui kondisi yang membuat Arab Saudi perlu untuk melakukan desekuritisasi.

Berdasarkan penelitian dari Itamar Rabinovich dengan karya ilmiahnya yang berjudul *Israel And The Changing Middle East*¹⁵, Israel memiliki keterbatasan dalam menentukan kebijakan keamanan nasionalnya di Timur Tengah meski hubungan perdagangan internasional masih terus terlaksana dengan negara tetangga. Disamping sama-sama menolak program nuklir Iran beserta upayanya menjadi hegemoni kawasan, Israel dan Arab Saudi beserta negara anggota *Gulf Cooperation Council* lainnya sama-sama berupaya untuk tetap membuka jembatan normalisasi antar negara. Penyebabnya karena negara-negara tersebut memiliki pandangan yang sama dengan Israel terkait peningkatan jihadis di kawasan Timur Tengah, dan waspada terhadap kebijakan luar negeri A.S. di Timur Tengah. Namun di bawah sistem kawasan yang berubah terus-menerus dan tidak stabil ini, di tambah peristiwa *Arab Spring* beberapa tahun belakangan, membuat kebijakan luar negeri Israel saat ini berada di bawah *focus dilemma*, antara meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan atau mengupayakan stabilitas keamanan kawasan.

Israel sudah memiliki perjanjian damai dengan Mesir dan Jordan. Kedua negara bahkan secara tidak langsung membeli gas alam dan tergantung pada persediaan air yang disediakan oleh Israel. Hal tersebut menuai kritik yang datang di dalam negeri kedua negara karena dianggap sebagai upaya normalisasi lewat kerjasama ekonomi dengan Israel dan adanya ancaman terlalu bergantung pada

¹⁵ Itamar Rabinovich, "Israel And The Changing Middle East," *Middle East Memo*. Number 34. (2015).

Israel dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya dalam negeri. Hubungan yang sama juga terjalin antara Israel dan Turki dimana kedua negara memiliki kerjasama ekonomi meski tidak memiliki hubungan diplomatik.

Namun pada penelitian Itamar Rabinovich, semakin dekatnya hubungan antara Israel dengan negara Teluk Arab masih belum bisa menjawab jika adanya indikasi normalisasi dengan Arab Saudi sebagai salah satu negara Teluk Arab tersebut. Hal ini dikarekanan Itamar lebih mencoba menjelaskan kepentingan Israel di negara Arab tanpa menspesifikan terhadap aktor Arab Saudi.

Berdasarkan hasil penelitian dari Oded Eran yang berjudul *Normalization between Israel and Arab States : Is the Idea Still Viable?*¹⁶, ide normalisasi pertama kali muncul di Timur Tengah secara formal lewat Perjanjian Damai 1979 antara Israel dengan Mesir. Meski perjanjian tersebut hanya melahirkan “perdamaian dingin” antara kedua belah pihak, perjanjian masih tetap merupakan poin referensi utama jika ingin mengkaji sejarah awal upaya normalisasi Timur Tengah. Situasi perdamaian dingin antara Mesir dan Yordania dengan Israel terus berlanjut dengan munculnya Konferensi Madrid 1991, Perjanjian Damai dengan Yordania 1994, dan Perjanjian Oslo. Selain menguatkan ide normalisasi, aktivitas-aktivitas Internasional ini juga mengangkat isu seperti air, lingkungan, kerjasama ekonomi, pengungsi, dan aturan bersenjata. Namun aktivitas-aktivitas cukup lambat dalam mendorong upaya normalisasi karena NATO dan Uni Eropa yang mengadopsi ide “perbedaan”. Yang dimaksud dengan “perbedaan” ini adalah diperbolehkannya tiap negara menjalin hubungan dengan kedua organisasi

¹⁶ Oded Eran, “Normalization between Israel and Arab States: Is the Idea Still Viable?,” *INSS Insight*. No.302 (4 Desember 2011).

Internasional sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka tanpa membutuhkan progres paralel dengan rekan lainnya di Dialog Mediterania (Yordania, Mauritania, Israel, Maroko, Tunisia, Algeria, dan Mesir).

Oded Eran mencoba menjelaskan bagaimana proses normalisasi yang dilakukan oleh Mesir dan Yordania terhadap Israel. Namun ini masih belum menjelaskan normalisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Israel sebagai sebuah negara.

Berdasarkan penelitian dari Gadi Hitman dengan Chen Kertcher yang dengan karya tulis yang berjudul *The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict*¹⁷, Arab Saudi dan Qatar membuat dua kebijakan dan dua model cara dalam merepresentasikan normalisasi dengan Israel meskipun masih membatasi bentuk diplomasi antara kedua negara dengan Israel. Bagi Arab Saudi, hubungan negara dengan Israel pada masa ini muncul terutama semenjak terjadinya *Arab Spring* di Timur Tengah. Meskipun tidak memiliki ikatan resmi dengan Israel, hubungan kedua negara memasuki babak “tidak ada kontak perselisihan langsung”. Keberadaan hubungan tersebut dibenarkan oleh pejabat resmi Arab Saudi terutama jika ingin mengadakan pertemuan dengan pihak Israel. Bagi Qatar, hubungan negara dengan Israel bermula di tahun 1996. Kekuasaan keluarga besar Khalid al-Thani di Qatar dari tahun 1995-2013 telah melahirkan kebijakan luar negeri yang kreatif yang mengakibatkan semakin meningkatnya hubungan negara dengan berbagai negara maupun NGO di Timur Tengah meskipun ada perselisihan antara pihak-pihak tersebut. Contohnya seperti Qatar yang

¹⁷ Gadi Hitman dan Chen Kertcher, “The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict,” *Ariel University Press*. Vol 2, Spring 2018.

mendukung Hamas di Perbatasan Gaza 2007 yang menginisiasi berbagai serangan terhadap Israel, dan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan Iran. Meskipun begitu Qatar tidak menegaskan secara terbuka sikap anti-Israel. Bahkan Qatar dikritik terutama ketika kunjungan Perdana Menteri Israel Shimon Perez mengunjungi Doha untuk membuka “Kantor Perwakilan Dagang Israel” di Doha.

Meskipun Hitman dan Kertcher memperlihatkan pola hubungan yang telah terjalin sebelumnya antara kedua negara, alasan kedua negara untuk melakukan normalisasi masih belum dapat terlihat lebih detail terutama jika melihat hubungan antara Arab Saudi dengan negara lainnya di Timur Tengah. Hubungan antara Arab Saudi dengan negara Arab lainnya seperti Iran dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri milik Arab Saudi sehingga melahirkan kebijakan normalisasi dengan Israel.

Dalam penelitian dari Joshua Teitelbaum yang berjudul “ *The Arab Peace Initiative: A Primer and Future Prospect* ”¹⁸, Keberadaan API sebagai alat utama melakukan normalisasi dapat memberikan prospek perkembangan yang positif di kawasan Timur Tengah. Ancaman kawasan yang muncul akibat Iran dan kelompok Fundamental Islam lainnya di Timur Tengah masih memberikan area bagi negara moderat Timur Tengah dengan Israel dalam menjalankan kerjasama meski tidak terpapar di mata publik.

Berakhirnya Operasi Cast Lead di Palestina meninggalkan luka terhadap realisasi API. Namun dengan adanya ancaman terhadap keamanan lainnya yang

¹⁸ Joshua Teitelbaum, “ *The Arab Peace Initiative: A Primer and Future Prospect*,” *Jerusalem Center for Public Affairs*, (2009).

bermunculan di Timur Tengah, langkah normalisasi antara negara Arab dengan Israel pada akhirnya melibatkan beberapa aspek kerjasama multilateral regional sesuai dengan Konferensi Perdamaian Madrid 1991. Tergantung pada bagaimana pertemuan multilateral dilakukan, pertemuan tersebut berkemungkinan membuka kesempatan untuk mewujudkan perjanjian bersama antar negara Timur Tengah. Hal ini sesuai dengan panggilan Presiden Obama yang menyuarakan agar terbukanya pintu multilateral antara negara Arab dengan Israel.

Karya tulis dari Joshua Teitelbaum ini menjelaskan bagaimana perkembangan laju normalisasi antara negara Arab dengan Israel masih terus berjalan terutama saat Pemerintah Amerika Serikat berada dibawah administrasi Presiden Obama. Penelitian kali ini menggunakan Arab Saudi sebagai fokus subjek penelitian agar hasil yang didapatkan lebih detail terutama proses kebijakan normalisasi Arab Saudi berjalan dari tahun 2015-2018, dimana administrasi Amerika Serikat telah berada di tangan Presiden Donald Trump.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Teori Desekuritisasi

Teori desekuritisasi merupakan teori yang dikembangkan di dalam *Copenhagen School* untuk meluaskan analisis keamanan setelah kompleksitas keamanan yang disampaikan oleh Buzan. Keberadaan teori ini merupakan *counterpart* dari sekuritisasi dalam menganalisa dinamika keamanan nasional suatu negara. Menurut Coskun, desekuritisasi lebih baik dipahami sebagai menghilangkan isu dari agenda keamanan.¹⁹ Jika sebelumnya penggunaan jalan

¹⁹ Besen Coskun, "Analysing desecuritisation : the case of Israeli and Palestinian peace education and water management," *Loughborough University*. (2009) hlm.30

kekerasan dilegitimasi untuk menahan isu ancaman, dengan desekuritisasi secara perlahan mundur dari penggunaan kekerasan sebagai opsi yang sah. Dengan kata lain, tujuan akhir dilakukannya desekuritisasi adalah situasi yang pada akhirnya tidak melihat isu sebelumnya sebagai ancaman, dan akhirnya tidak lagi dilihat dari bahasa keamanan. Hal ini juga disampaikan oleh Buzan dan Waever dalam mendefinisikan desekuritisasi sebagai :

“A process in which a political community downgrades or ceases to treat something as an existential threat to a valued referent object, and reduces or stops calling for exceptional measures to deal with the threat”²⁰

Terkait bagaimana desekuritisasi dapat berjalan, Copenhagen School menggarisbawahi tiga opsi bagi si pembuat kebijakan. Pertama, jika dari awal memang tidak membicarakan isu dalam bahasa keamanan. Kedua, jika isu sudah disekuritisasi, cobalah untuk tidak membuat dilema keamanan dan “lingkar setan”. Ketiga, menggerakkan kembali isu keamanan menjadi politik normal.²¹ Dalam kasus perselisihan antara Arab Saudi dengan Israel, opsi pertama dengan yang kedua tidak lagi bisa digunakan karena sebelumnya kedua negara sama-sama memiliki bahasa keamanan satu sama lainnya. Selain itu, konflik perselisihan antara Arab Saudi dengan Israel selalu dibumbui dilema keamanan karena proses *peace making* yang selalu gagal didalam normalisasi. Hal tersebut membuat satu-satunya opsi bagi Arab Saudi maupun Israel untuk melakukan normalisasi adalah dengan mengembalikan isu keamanan menjadi ranah politik normal. Opsi inilah

²⁰ Barry Buzan dan Ole Waever,” *Regions and Power: the Structure of International Security*,” Cambridge: Cambridge University Press. (2003). Hlm. 489

²¹ Ole Waever,” (2000) Hlm 253.

yang menjadi pilihan Arab Saudi dalam melakukan normalisasi dengan Israel agar terciptanya hubungan diplomatik yang normal.

Dalam menganalisis desekuritisasi didalam Copenhagen School, proses analisis harus dengan memahami bagaimana dinamika keamanan negara itu bekerja. Menurut Buzan:

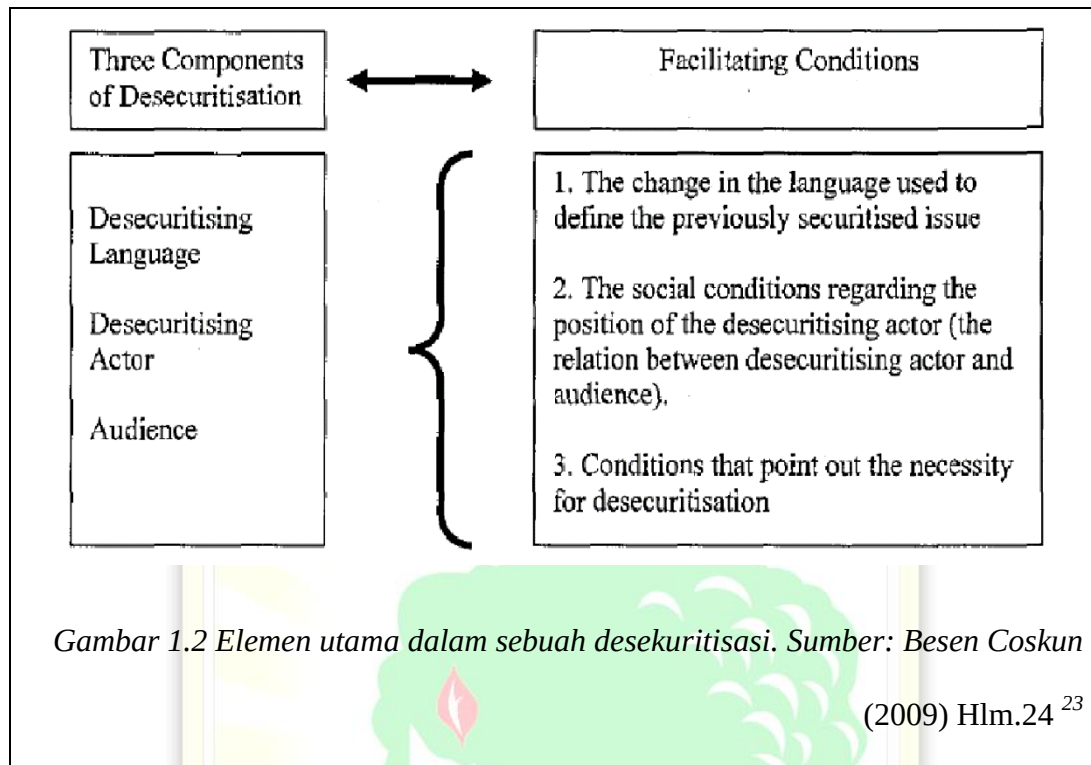
[o]ur approach links itself more closely to existing actors, tries to understand their *modus operandi*, ... our philosophical position is in some sense more radically constructivist in holding security to always be a political construction and not something the analyst can describe as it 'really' is

Gambar. 1.1. Pendekatan analisis sekuritisasi. Sumber : Buzan (1998) Hlm.35.²²

Berdasarkan pendekatan Buzan tersebut, penganalisisan mengenai *modus operandi* yang dimiliki oleh aktor perlu dilakukan agar mengetahui bagaimana aktor mengatur keamanan negaranya. Untuk mendapatkan *mapping* yang pas di dalam desekuritisasi, Bezer Coskun mencoba menganalisis elemen dari sebuah sekuritisasi membutuhkan perhatian penuh terhadap komponen sekuritisasi dan kondisi yang memfasilitasi dilakukan desekuritisasi.

Meskipun di dalam Copenhagen School tidak secara eksplisit menjelaskan elemen dari sebuah desekuritisasi, Bezer Coskun membuat bagan dari sebuah desekuritisasi dengan menyimpulkan pengamatannya terhadap analisis keamanan dalam pendekatan tersebut. Hasilnya, Coskun melihat :

²² Barry Buzan , Ole Waever, dan Jaap deWilde," Security: A New Framework for Analysis," (1998). hlm.35



Didalam kondisi yang memfasilitasi sebuah desekuritisasi, terdapat tiga komponen dari sebuah desekuritisasi, yaitu *Desecuritizing Language*, *Desecuritizing Actor*, dan *Audience*. Ketiga komponen ini merupakan hal pokok yang terdapat didalam proses desekuritisasi. Didalam teori desekuritisasi, tiga komponen tersebut tidak bisa dipisahkan satu komponen dengan yang lainnya karena memiliki pengaruh yang begitu kuat sehingga saling mempengaruhi. Pengaruh yang diberikan oleh komponen tersebut membentuk proses desekuritisasi sehingga dapat terjadi. Dalam mengetahui keberhasilan dari proses desekuritisasi, terdapat tiga *facilitating conditions* untuk dilakukannya desekuritisasi.

²³ Besen Coskun, "Analysing desecuritisation : the case of Israeli and Palestinian peace education and water management," *Loughborough University*. (2009) hlm.24

1.7.1.1 Desecuritizing Language, Desecuritizing Actor, dan Audience

Dalam melakukan sekuritisasi, Weaver menegaskan kenapa keamanan bukanlah kondisi objektif melainkan tutur kata yang diucapkan. Waever mendefenisikan keamanan sebagai *speech act*, dimana :

“Security is not of interest as a sign that refers to something more real; the utterance itself is the act.... By uttering ‘security’, a state representative moves a particular development into a specific area, and thereby claims a special right to use whatever means are necessary to block it.”²⁴

Berdasarkan definisi dari Waever tersebut, *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi untuk menggambarkan *security* mereka merupakan komponen penting dalam upaya sekuritisasi. Namun di dalam teori desekuritisasi, *speech act* yang digunakan oleh para aktor sekuritisasi tidak lagi digunakan untuk menegaskan bahasa keamanan terhadap suatu isu, namun sebaliknya, yaitu menggunakan *desecuritizing language*. Andreas Behnke menunjukkan desekuritisasi dengan menggunakan *speech act* itu kontadiktif. Behnke menegaskan deklarasi untuk melakukan desekuritisasi akan membuka permainan bahasa. Sebuah isu di-desekuritisasikan bukan karena *speech act* yang mengkonfirmasi status negaranya, namun lewat kurangnya melakukan *speech act* sekuritisasi.²⁵

²⁴ Ole Waever, "Securitisation and Desecuritisation," (1995) Hlm. 55

²⁵ Andreas Behnke, "No way out: Desecuritization, emancipation and the eternal return of the political – a reply to Aradau," *Journal of International Relations and Development* 9 (1). (2006) Hlm. 65

Menurut Andrea Oelsner didalam penelitiannya yang menerapkan konsep desekuritisasi dalam kasus perdamaian kawasan di Amerika Latin, aktor yang krusial proses dari desekuritisasi biasanya datang dari *policy-makers* maupun elit politik, ekonomi, dan sosial di suatu negara.²⁶ Aktor desekuritisasi berupaya untuk meyakinkan publiknya (yaitu *Audience* berdasarkan analisis sekuritisasi) dengan *desecuritizing language* milik mereka. Aktor desekuritisasi juga bisa datang dari pihak yang sebelumnya melakukan desekuritisasi isu dan kemudian memiliki perubahan persepsi terhadap isu tersebut.

Menurut Oelsner, sebuah isu dapat melewati *security language* lewat dua jalan.²⁷ Pertama dikarenakan isu kehilangan *image* ancamannya karena persepsi aktor dan *audience* yang berubah positif terhadap sifat ancaman isu. Mekanisme pasif ini hampir tidak melibatkan upaya dari aktor dan *audiencenya* karena isu ancaman menghilang begitu saja. Kedua karena baik aktor maupun *audience* mendapatkan perubahan kualitatif dalam hubungan mereka dan sekuritisasi ancaman. Pada mekanisme yang kedua ini membutuhkan tranformasi kualitatif yang aktif, dikarenakan hubungannya di taksir kembali. Dengan taksiran tersebut, mereka semakin mempercayai fakta bahwa tidak ada ancaman di dalam isu tersebut. Khusus dalam permasalahan normalisasi Arab Saudi terhadap Israel di tahun 2015-2018, begitu banyak *desecuritizing language* yang dilontarkan oleh aktor desekuritisasi Arab Saudi yang menaksir isu ancaman Israel bukan lagi menjadi sebuah prioritas. Untuk mengetahui seperti apa kondisi Arab Saudi

²⁶ Andreas Oelsner, " (De)securitization Theory and Regional Peace: Some Theoretical Reflections and a Case Study on the way to Stable Peace," European University Institute, (2005). Hlm. 15

²⁷ Andreas Oelsner (2005). Hlm. 4

melakukan upaya normalisasi dengan Israel di tahun 2015-2018, maka diperlukan penjelasan *facilitating conditions* dari teori desekuritisasi.

1.7.1.2 Facilitating Conditions.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Copenhagen School mengusulkan bahwa desekuritisasi dilahirkan dari *desecuritizing language* oleh aktor yang mengklaim berbicara tentang dan meminta hak untuk bertindak atas namanya. Sesuai dengan posisi *desecuritizing language* sebagai salah satu dasar komponen desekuritisasi yang secara defenisi merupakan proses komunikasi inter-subjektif, setidaknya ada dua sisi yang terlibat, yaitu aktor desekuritisasi dan *audience*. Untuk menyempurnakan sebuah upaya desekuritisasi, Coskun melihat faktor yang dapat memfasilitasi desekuritisasi. Faktor tersebut merupakan penilaian yang ia lakukan setelah mengamati kondisi sukses atau tidaknya sebuah sekuritisasi di dalam teori sekuritisasi, dan memiliki sedikit perubahan sesuai dengan komponen yang bermain di dalam proses desekuritisasi. Terinspirasi dari konsep "*felicity conditions*" milik Austin, kondisi yang memfasilitasi desekuritisasi Coskun merujuk kepada:²⁸

1. *The Change in the language used to define the previously securitised issue.* Perubahan *language* yang dipakai aktor desekuritisasi didasarkan pada tata bahasa dan konstruksi cerita yang diutarakan oleh aktor tersebut. Aktor desekuritisasi akan mengeluarkan pernyataan yang mengisyaratkan perubahan dari yang awalnya isu tersebut di-sekuritisasi, di-desekuritisasikan kembali. Hal ini didasari oleh analisis Oelsner yang *desecuritizing language* berhubungan dengan

²⁸ Ole Weaver, "Regions and Power," Hlm.15

perubahan strategi yang dibawakan aktor desekuritisasi.²⁹ Di dalam periode normalisasi Arab Saudi terhadap Israel di tahun 2015-2018, strategi dari aktor kerajaan seperti Muhammad bin Salman dapat menjadi contoh dari fokus pengamatan desekuritisasi terhadap Israel.

2. *Social conditions regarding the position of the desecuritizing actor (the relation between desecuritising actor and audience)*. Semakin berpengaruh wewenang yang dimiliki oleh aktor desekuritisasi dalam pemerintahan dan bagaimana hubungan yang ia miliki dengan *audience* dapat menjadi daya pendorong keberhasilan sebuah desekuritisasi. Menurut Thierry Balzacq, aktor desekuritisasi dapat mendapatkan dua bentuk dukungan dari para *audience*: formal dan moral.³⁰ Semakin harmoni bentuk dukungan keduanya, maka desekuritisasi isu dapat terjadi. Aktor desekuritisasi juga mencari dukungan moral dari masyarakat mereka sendiri dalam bentuk opini publik. Sedangkan secara formal, aktor desekuritisasi memerlukan dukungan untuk melakukan tindakan pencegah ancaman dengan segala cara secara legal. Aktor desekuritisasi mencoba mendapatkan dukungan dari *audience* tersebut lewat agen politik agar membentuk opini publik dan bantuan formal yang sesuai dengan *desecuritizing language* yang digunakan aktor desekuritisasi. Dalam kasus normalisasi Arab Saudi terhadap Israel, publik dari Arab Saudi memiliki pengaruh kuat berhasil tidaknya desekuritisasi ancaman Israel.

3. *Conditions that point out the necessity for desecuritisation*. Menurut Oelsner, ada dua fase dalam proses desekuritisasi. Fase pertama adalah stabilisasi

²⁹ Oelsner (2005). Hlm. 4

³⁰ Thierry Balzacq (2005) hlm.184-185

perdamaian dan langkah pertama menuju desekuritisasi domestik.³¹ Fase tersebut merupakan fase terbuka pintunya hubungan antara kedua agen yang dulunya antagonis. Fase kedua melibatkan konsolidasi perdamaian, semakin meluasnya *mutual-desecuritisation* yang terus tumbuh. Pada fase ini lebih kepada perkembangan dan konsolidasi di dalam proses desekuritisasi. Di dalam kasus normalisasi antara Arab Saudi dengan Israel, kedua negara telah berada di fase kedua dimana *mutual-trust* antar pihak semakin terbangun di tahun 2015-2018. Oleh karena itu, diperlukan analisis kondisi yang membuat terbangunnya *mutual-trust* terjadi di tahun 2015-2018. Ketika pihak yang berselisih telah menemukan *mutual-trust* mereka, proyek bersama dan bahkan institusi bersama bisa diharapkan terbentuk. Dalam hal ini, dalam normalisasi Arab Saudi dan Israel terdapat indikasi adanya kepentingan yang sama karena kondisi tertentu di Timur Tengah.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Berdasarkan Boogdan dan Taylor, pendekatan metode kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis dan lisan dari aktor dan perilaku yang diamati. Analisis tersebut berupa sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja

³¹ Oelsner (2005) hlm.14

seperti yang disarankan oleh data.³²Peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ekplanatif untuk menjelaskan potensi terbuka yang dapat menjadi upaya Arab Saudi secara menyeluruh.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam menentukan rentang waktu data penelitian, penulis akan menjadikan tahun 2015-2018 sebagai rentang waktu data penelitian. Pengambilan data pada rentang waktu tersebut tidak lepas dari pandangan titik awal peneliti yang melihat perubahan pendekatan kebijakan normalisasi Arab Saudi dengan Israel semakin intensif dari tahun 2015 dan masih terus berjalan sampai sekarang. Penggunaan tahun 2018 sebagai rentang waktu akhir dikarenakan masih berlanjutnya proses normalisasi dengan Israel sampai saat ini.

1.8.3 Unit Analisis dan Level Analisis

Dalam menentukan tingkat analisis penelitian, maka diperlukan penentuan unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis adalah perilaku yang hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan ramalkan biasa disebut juga sebagai variabel dependen, sedangkan unit eksplanasi adalah dampaknya terhadap unit analisis yang hendak diamati yang biasa disebut variabel independen.³³ Dalam melakukan penelitiannya, peneliti akan menjadikan “*upaya normalisasi Arab Saudi terhadap Israel*” sebagai unit analisis dan “*kondisi yang memfasilitasi normalisasi*” sebagai unit ekplanasi penelitian. Sedangkan level analisis yang hendak dipakai yaitu sesuai dengan dengan pendekatan konseptual penelitian. Penelitian ini akan

³² Moleong Lexo,” Metode Penelitian Kualitatif,” Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. (2000) hlm.103

³³ Mochtar Mas’oed,” Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi,” Jakarta : LP3S. (1994).

menggunakan level analisis negara sesuai dengan keterlibatan aktor yang mempengaruhi dilakukannya sekuritisasi oleh sebuah negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terfokus metode studi pustaka, dimana pencarian informasi ilmiah dengan menelaah buku baik yang terdapat di pustaka, *bulletin*, maupun sumber lain selama terbukti kredibilitas informasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak terkait, arsip-arsip, artikel, laporan-laporan, dan sumber-sumber online yang berkredibilitas. Pada penelitian kali ini, data-data interview dari Muhammad bin Salman lewat berbagai *media outlet* (seperti majalah TIME, The Guardian, dan sebagainya) juga menjadi sumber dari buktinya *desecuritising language* yang digunakan aktor desekuritisasi.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian eksplanatif ini, peneliti mencoba menganalisis data sesuai dengan langkah langkah yang telah tergambarkan dengan pendekatan penelitian kualitatif dari Miles dan Huberman.³⁴ Setelah menentukan desain penelitian seperti judul, tujuan, manfaat, pertanyaan, dan kerangka berpikir penelitian, peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul penelitian guna menjawab pertanyaan yang telah ditentukan. Data-data sekunder berkredibilitas yang telah dipilih akan menjadi bahan bacaan dan sumber informasi penelitian.

³⁴ Miles, M.B dan Huberman, M.A. Qualittative Data Analysis. London: Sage Publication (1984).

1) Reduksi Data

Setelah mendapatkan data-data terkait, selanjutnya peneliti melakukan reduksi data tersebut dengan memfokuskan pada data-data pokok sesuai dengan kerangka berpikir yang dipakai untuk memudahkan proses analisis. Proses reduksi perlu dilakukan agar data-data atau sumber yang tidak berhubungan dengan penelitian tidak menjadikan penelitian ini menjadi sulit dimengerti karena tidak *to-the-point*. Di dalam kasus penelitian kali ini, dalam menganalisis upaya normalisasi Arab Saudi terhadap Israel di tahun 2015-2018 dimulai dengan pembahasan sejarah upaya normalisasi Arab Saudi pertama kalinya sampai respon pihak terkait terhadap normalisasi tersebut.

2) Penyajian data

Bersamaan dengan reduksi data tersebut, peneliti berusaha untuk menganalisis data sesuai dengan teori penelitian yang dipakai. Upaya analisis menjadi tahapan paling penting penelitian sebelum menyajikan hasil akhir atau kesimpulan penelitian. Penjelasan analisis terstruktur terhadap data-data yang dipakai merupakan kewajiban peneliti dalam menyajikan model data. Pada penelitian ini, analisis upaya normalisasi akan menggunakan elemen teori desekuritisasi agar mendapatkan gambaran kondisi Arab Saudi yang membuat negara melakukan normalisasi. Dengan mengetahui komponen dan *facilitating conditions* sebuah sekuritisasi, ada beberapa variabel yang dijadikan alat bantu untuk menentukan kondisi yang memfasilitasi normalisasi Arab Saudi. Yang pertama, membahas bagaimana perubahan *speech act* menjadi *desecuritizing language* yang dilakukan oleh aktor desekuritisasi yaitu Muhammad bin Salman.

Kedua, Otoritas dan hubungan aktor desekuritisasi MBS dengan publik Saudi. Dan yang terakhir, kondisi yang membuat dibutuhkan desekuritisasi berdasarkan situasi di Timur Tengah.

3) Penarikan Kesimpulan

Penyajian hasil penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dengan melakukan penjelasan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pemberian saran juga perlu dilakukan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk digunakan kedepannya. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil dengan menggunakan ketiga variabel dari *facilitating conditions* dalam desekuritisasi yaitu, kondisi ancaman dari pengaruh luar (terutama Iran) menjadi alasan kenapa desekuritisasi dapat berjalan meski beberapa kali mengalami kegagalan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini meliputi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan kerangka konseptual analisis penelitian.

BAB II Dinamika Normalisasi Arab Saudi di Timur Tengah.

Bab ini menjelaskan bagaimana perjalanan upaya normalisasi yang dilakukan Arab Saudi terhadap Israel di Timur Tengah. Dinamika tersebut juga menjelaskan tindakan mulai dari tahun 1981 lewat *Fahd Plan* sampai tahun 2015 yang dilakukan oleh Arab Saudi sebagai *peacemaker* di kawasan Timur Tengah dalam kasus perselisihan Dunia Arab dengan Israel.

BAB III. Respon Terhadap Normalisasi Arab Saudi di Timur Tengah.

Bab ini menjelaskan respon berbagai pihak terhadap normalisasi Arab Saudi dan Israel. Respon tersebut memperlihatkan gambaran bagaimana normalisasi dalam prosesnya ditanggapi oleh berbagai pihak sebagai langkah utama Arab Saudi dalam proses perdamaian.

BAB IV Analisis Normalisasi Arab Saudi 2015-2018.

Bab ini menjelaskan analisis terhadap normalisasi berdasarkan teori desekuritisasi Arab Saudi dalam di kawasan Timur Tengah di tahun 2015-2018 sesuai dengan kerangka berpikir yang dipakai di dalam penelitian. Penelitian ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang sesuai teori desekuritisasi yang disampaikan oleh Bezen Coskun dalam membawakan desekuritisasi sebagai salah satu faktor terjadinya normalisasi.

BAB V Kesimpulan

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran dari hasil analisis penelitian sesuai dengan jawaban yang didapatkan dengan konsep dan teori yang dipakai.

